

SALINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 201 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM PELAKSANA LAYANAN PUBLIK PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pelayanan publik pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan tim pelaksana kegiatan layanan publik pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 5. Keputusan Presiden Nomor 125/TPA Tahun 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA LAYANAN PUBLIK PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Layanan PPID) yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Layanan PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan data informasi publik pada masing-masing unit organisasi eselon II;
 - b. Memperbarui daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan pada masing-masing unit organisasi eselon II;
 - c. Melakukan pengelolaan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi pada masing-masing unit organisasi eselon II;
 - d. Berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan persiapan pengujian konsekuensi daftar informasi publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
 - e. Berkoordinasi dengan PPID dalam melaksanakan kegiatan persiapan pengujian konsekuensi daftar informasi publik;
 - f. Berkoordinasi dengan PPID dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan persiapan pengujian konsekuensi daftar informasi publik LKPP;
 - g. Berkoordinasi dengan PPID dalam melaksanakan evaluasi terhadap informasi publik yang telah dilakukan pengujian konsekuensi;
 - h. Memberikan pembaruan informasi kegiatan/berita di masing-masing unit organisasi eselon II kepada Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum LKPP secara berkala;
 - i. Bertindak sebagai penghubung jika ada permintaan informasi yang diterima oleh Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum LKPP; dan
 - j. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala LKPP.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pelaksana Layanan PPID dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan LKPP dan instansi terkait.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pelaksana Layanan PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 161 Tahun 2020 tentang Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2021
Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama;
2. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA
LAYANAN PUBLIK PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 201 TAHUN 2021

TANGGAL : 12 NOVEMBER 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA LAYANAN PUBLIK PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

Kedudukan dalam Tim		Nama
Penanggung Jawab	:	Robin Asad Suryo
Ketua	:	Shahandra Hanitiyo
Anggota	:	1. Dodi Wahyugi 2. Mukti Herlambang 3. Makkiyah Farizqi 4. Imelda Liliana 5. Ribut Aji Kasmiadi 6. Setiawan Rahandi Sabri 7. Asih Riska Nurmasari 8. Rinaldy Prihandoko 9. Budi Bowo Laksono 10. Andi Darmawan 11. Rinatri Rahmayanti 12. Mahendra Gilang Ramadhynara 13. Dara Kumala Arumbuana 14. Mega Chandra Sera 15. Fuady Satria 16. Verawaty Simorangkir 17. Tri Angga Putra Pamungkas

		18. Lutfi Prafidya Ferisa 19. Agung Ismail 20. Jefry Seftian
--	--	--

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA